

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-1/PPID/2026
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pembahasan terhadap usul informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, terhadap daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- c. bahwa penyesuaian terhadap daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
DENI SURJANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 1 /PPID/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2026

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
PERIMBANGAN KEUANGAN						
304.	Rincian Alokasi dan Realisasi Transfer ke Daerah, yang terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; c. Dana Alokasi Khusus Fisik; d. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik; e. Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal; f. Dana Otonomi Khusus;	a. Direktorat Dana Transfer Umum (DTU). b. Direktorat Dana Transfer	a. Direktur DTU. b. Direktur DTK. c. Direktur DDIOKK.	Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy.</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
	g. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan h. Dana Desa. Kode Arsip: 1. IK0.0.2 (Pengalokasian Dana Bagi Hasil [DBH]) 2. IK0.1.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Umum [DAU]) 3. IK0.2.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik) 4. IK0.3.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik) 5. IK0.6.2 (Pengalokasian Dana Tambahan Infrastruktur) 6. IK0.9.2 (Pengalokasian Insentif Fiskal) 7. IK0.5.2 (Pengalokasian Dana Otonomi Khusus) 8. IK0.7.1 (Pengalokasian Dana Keistimewaan) 9. IK0.8.2 (Pengalokasian Dana Desa) 10. IK5.0 (Laporan Keuangan TKD)	Khusus (DTK). c. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK).				Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan (IK0.0.2, IK0.1.2, IK0.2.2, IK0.3.2, IK0.5.2, IK0.7.1, IK0.8.2, IK0.9.2) 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan (IK5.0)

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
305.	Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi. Kode Arsip: IK1.0 (Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	Direktur PDRD.	Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
306.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).	Direktur SPK.	Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy</i> .	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
307.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Fungsi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).	Direktur SPK.	Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy</i> .	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
308.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Urusan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).	Direktur SPK.	Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy</i> .	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
309.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Pajak.	Direktorat Sistem	Direktur SPK.	Tahun 2021, 2022, 2023,	<i>Softcopy</i> .	5 tahun setelah tahun

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
	Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Perimbangan Keuangan (SPK).		2024, 2025, 2026, Jakarta.		penciptaan arsip.
310.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Retribusi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).	Direktur SPK.	Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy.</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
311.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).	Direktur SPK.	Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy.</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
312.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).	Direktur SPK.	Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy.</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
313.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulanan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK).	Direktur SPK.	Bulanan, Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Jakarta.	<i>Softcopy.</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
DENI SURJANTORO

